



Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup pada Kasus Petambak Udang Ilegal di Kawasan Taman Nasional Karimun Jawa

Fernando¹, Syamsul², Serlika Aprita^{*3}

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

Alamat: Dua, Jl. Jenderal Ahmad Yani, 13 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30263

Korespondensi Penulis : 5312lika@gmail.com*

Abstract. *This research discusses the role of environmental law in preventing environmental damage and pollution with a case study of illegal shrimp farmers in the Karimunjawa National Park Area. The Karimunjawa National Park area is an ecosystem that is rich in biodiversity and has vital ecological functions. However, illegal shrimp farming activities in this area have caused significant environmental damage, including decreased water quality and damage to mangrove habitats. This research uses a normative juridical approach to analyze applicable environmental legal regulations and policies as well as the effectiveness of law enforcement in preventing and dealing with the activities of illegal shrimp farmers. The research results show that although there are clear regulations regarding environmental protection, implementation and enforcement of the law are still weak. Lack of coordination between institutions, minimal human resources, and technical obstacles in the field are the main inhibiting factors in enforcing environmental law. This research recommends increasing law enforcement capacity, increasing coordination between institutions, and strengthening local community participation in environmental protection efforts in the Karimunjawa National Park Area. With these steps, it is hoped that environmental damage and pollution due to illegal activities can be minimized.*

Keywords: *Environmental Law, Environmental Damage, Environmental Pollution, Illegal Shrimp Farmers, Karimunjawa National Park, Law Enforcement, Conservation.*

Abstrak. Penelitian ini membahas peran hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dengan studi kasus pada petambak udang ilegal di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Kawasan Taman Nasional Karimun Jawa merupakan salah satu ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki fungsi ekologis yang vital. Namun, aktivitas penambakan udang ilegal di kawasan ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk penurunan kualitas air dan kerusakan habitat mangrove. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi dan kebijakan hukum lingkungan yang berlaku serta efektivitas penegakan hukum dalam mencegah dan menangani aktivitas petambak udang ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang jelas mengenai perlindungan lingkungan, implementasi dan penegakan hukum masih lemah. Kurangnya koordinasi antar lembaga, minimnya sumber daya manusia, dan kendala teknis di lapangan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan penguatan partisipasi masyarakat lokal dalam upaya perlindungan lingkungan di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas ilegal dapat diminimalisir.

KataKunci: Hukum Lingkungan, Kerusakan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan, Petambak Udang Ilegal, Taman Nasional Karimunjawa, Penegakan Hukum, Konservasi.

1. LATAR BELAKANG

Kawasan Taman Nasional Karimunjawa merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Dengan luas sekitar 1.100 km²,

kawasan ini mencakup berbagai ekosistem penting seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun yang mendukung keanekaragaman hayati yang tinggi. Taman Nasional Karimunjawa juga berperan penting sebagai penyangga kehidupan bagi masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam di kawasan tersebut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas petambak udang ilegal di kawasan ini telah menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan. Praktik penambakan udang yang tidak memperhatikan kaidah lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove, pencemaran air, dan penurunan kualitas habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Kerusakan ini bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi sandaran ekonomi masyarakat lokal.

Peran hukum lingkungan menjadi sangat penting dalam konteks ini. Hukum lingkungan di Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk melindungi kawasan konservasi dari aktivitas yang merusak lingkungan. Namun, implementasi dan penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknis, sumber daya, maupun koordinasi antar lembaga. Studi kasus ini akan mengkaji bagaimana hukum lingkungan dapat berperan efektif dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dapat diambil untuk memperkuat upaya perlindungan lingkungan di kawasan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis peran hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup pada kasus petambak udang ilegal di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis regulasi hukum yang berlaku dan implementasinya dalam konteks perlindungan lingkungan. Tahapan metode penelitian ini meliputi:

1. Studi Kepustakaan : Pengumpulan data sekunder melalui telaah literatur dan dokumen hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta literatur ilmiah terkait hukum lingkungan dan konservasi alam.
2. Analisis Dokumen Hukum : Mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan lingkungan di kawasan konservasi, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas petambak udang. Regulasi yang dianalisis

meliputi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan terkait konservasi taman nasional.

3. Studi Kasus : Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data empiris mengenai praktik penegakan hukum lingkungan di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, petugas taman nasional, dan masyarakat lokal.
4. Analisis Data : Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dan implementasi hukum lingkungan. Analisis ini mencakup identifikasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum serta rekomendasi untuk perbaikan ke depan.
5. Triangulasi Data : Untuk memastikan validitas data, dilakukan triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti literatur, dokumen hukum, dan hasil wawancara lapangan.

Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang peran hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan dan pencemaran akibat aktivitas petambak udang ilegal serta memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat upaya perlindungan lingkungan di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas petambak udang ilegal di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Beberapa temuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kerusakan Ekosistem Mangrove : Aktivitas penambakan udang ilegal telah mengakibatkan penebangan mangrove secara masif, yang berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi dan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna.
2. Pencemaran Air : Limbah dari tambak udang, termasuk sisa pakan dan bahan kimia, telah mencemari air di sekitar kawasan tersebut. Pencemaran ini berdampak buruk pada kualitas air dan mengancam kehidupan biota laut.
3. Penegakan Hukum yang Lemah : Meskipun ada regulasi yang jelas mengenai perlindungan kawasan konservasi, implementasi di lapangan masih lemah. Beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum termasuk kurangnya sumber daya

manusia, keterbatasan dana, dan minimnya koordinasi antar lembaga terkait.

4. Partisipasi Masyarakat Lokal : Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam upaya perlindungan lingkungan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya konservasi dan manfaat jangka panjang dari pelestarian lingkungan.

Adapun yang Berperan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Pada Kasus Petambak Udang Ilegal Di Kawasan Taman Nasional Karimun Jawa adalah sebagaiberikut :

1. Peran Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah menetapkan dasar-dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif. Indonesia memiliki beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk:

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya : Mengatur konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem.
- b. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam : Mengatur pengelolaan dan perlindungan kawasan suaka alam. Namun, implementasi di tingkat lokal, terutama di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Karimunjawa, masih menghadapi berbagai kendala.

2. Hambatan dalam Penegakan Hukum

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum lingkungan adalah kurangnya sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum. Aparat sering kali tidak memiliki peralatan dan keahlian yang memadai untuk melakukan patroli dan penindakan di kawasan yang luas dan sulit dijangkau. Selain itu, koordinasi antar lembaga, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pihak Taman Nasional, dan pemerintah daerah, masih belum optimal. Jika mau berhasil maka penegakan hukum lingkungan harus melibatkan berbagai tindakan dan strategi yaitu :

- a. Pemeriksaan dan Penindakan : Pemerintah dan lembaga terkait melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tambak udang ilegal dan memberikan sanksi sesuai dengan undang-

undang yang berlaku.

- b. Pengawasan dan Pengendalian : Pengawasan rutin dilakukan untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal yang merusak lingkungan. Ini termasuk patroli oleh petugas taman nasional dan aparat penegak hukum.
- c. Edukasi dan Sosialisasi : Masyarakat dan pelaku usaha diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak negatif dari aktivitas ilegal. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum lingkungan.

3. Peran Lembaga dan Instansi

Beberapa lembaga dan instansi yang berperan dalam penegakan hukum lingkungan di antaranya:

- a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Bertanggung jawab atas kebijakan dan pengawasan lingkungan hidup.
- b. Balai Taman Nasional Karimunjawa : Mengelola dan melindungi kawasan taman nasional.
- c. Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) : Menangani proses hukum dari penyelidikan hingga pengadilan terhadap pelaku aktivitas ilegal.

4. Partisipasi Masyarakat Lokal

Partisipasi masyarakat lokal merupakan elemen kunci dalam upaya konservasi. Masyarakat lokal sering kali memiliki pengetahuan tradisional tentang cara menjaga ekosistem sekitarnya. Namun, tanpa dukungan dan pendidikan yang memadai, mereka dapat terlibat dalam praktik-praktik yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, sosialisasi dan program pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan peran hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan dan pencemaran akibat petambak udang ilegal adalah:

- 1) Penguatan Kapasitas Penegak Hukum: Melalui pelatihan dan penyediaan peralatan yang memadai untuk aparat penegak hukum.
- 2) Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga : Melalui pembentukan tim terpadu yang

melibatkan berbagai pihak terkait.

- 3) Sosialisasi dan Edukasi : Meningkatkan kesadaran masyarakat lokal tentang pentingnya konservasi dan menyediakan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan.
- 4) Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Konsisten : Melakukan patroli rutin dan menindak tegas pelaku kegiatan ilegal di kawasan konservasi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum lingkungan memiliki peran yang krusial dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, khususnya pada kasus petambak udang ilegal di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Meskipun regulasi yang ada sudah cukup komprehensif, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan.

Kerusakan Lingkungan : Aktivitas petambak udang ilegal telah menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove, pencemaran air, dan penurunan kualitas habitat di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Kerusakan ini mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.

Penegakan Hukum yang Lemah : Kendala utama dalam penegakan hukum lingkungan adalah kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan dana, dan minimnya koordinasi antar lembaga terkait. Penegakan hukum yang lemah menyebabkan pelanggaran terus terjadi tanpa adanya sanksi yang efektif.

Partisipasi Masyarakat Lokal : Rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam upaya konservasi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Masyarakat lokal perlu diberdayakan dan diberikan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada praktik yang merusak lingkungan.

Rekomendasi : Untuk meningkatkan efektivitas peran hukum lingkungan, diperlukan penguatan kapasitas penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat lokal, serta pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

serta menjaga keberlanjutan ekosistem di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

Dengan demikian, upaya perlindungan lingkungan yang lebih efektif dan partisipatif diperlukan untuk memastikan kelestarian Kawasan Taman Nasional Karimunjawa dan kesejahteraan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bullard, R. D. (2023). *Environmental justice: Issues, policies, and solutions*. Island Press.
- Elver, H. (2022). *The role of law in environmental protection: Contemporary issues and perspectives*. Routledge.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Data kawasan konservasi taman nasional Karimunjawa*.
- Purwanto, A. (2020). Tantangan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 22(3).
- Santosa, D. (2021). Dampak lingkungan dari aktivitas penambakan udang ilegal di Karimunjawa. *Jurnal Ekologi Tropis*, 15(2).
- Sudarmadi, R. (2021). Kendala dan tantangan dalam penegakan hukum lingkungan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2).
- Sukmaningrum, N. (2021). Koordinasi antar lembaga dalam perlindungan lingkungan. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(3).
- Supriatna, J. (2023). Pemberdayaan masyarakat untuk konservasi lingkungan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1).